



ANALISIS PEMBAGIAN SISTEM PEREKONOMIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ANALYSIS OF THE DIVISION OF THE ECONOMIC SYSTEM AND ITS IMPACT ON PUBLIC WELFARE

Dava Saputra¹, Haditias², Ragil Nurhidayat³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: saputradava221@gmail.com¹, haditias165@gmail.com², ragilnurhidayat12@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 11-11-2025

Revised : 12-11-2025

Accepted : 14-11-2025

Published : 16-11-2025

Abstract

This study examines the role of private investment in driving Indonesia's economic growth throughout 2020-2024, a period marked by pandemic contraction, gradual recovery, and inflation normalization. The research objectives are: (i) to assess the contribution of Domestic Direct Investment (PMDN) and Foreign Direct Investment (PMA) to GDP growth; (ii) to identify differences in impacts across sectors and regions; (iii) to evaluate the role of mediating variables (inflation, interest rates, capital expenditure) in channeling the influence of investment to output. The qualitative-descriptive design is based on secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) for 2020-2024 and investment realization data from the Ministry of Investment/BKPM. The analysis includes tabulation of indicators (CPI inflation, GDP growth, PMDN, FDI) and literature-based thematic coding. The results show that GDP has recovered to around $\pm 5\%$ since 2022, accompanied by a decline in inflation (after the 2022 peak) and a surge in total investment, especially FDI, which strengthens capacity and efficiency. Domestic direct investment (PMDN) has increased, but its impacts are more heterogeneous and sensitive to infrastructure, financing, and governance. The conclusions emphasize the importance of macroeconomic stability, infrastructure acceleration, human resource quality improvement, and regulatory certainty to maximize the contribution of private investment to inclusive and sustainable growth.

Keywords: *Private Investment, Growth, Economy.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pembagian sistem perekonomian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari realitas bahwa sistem ekonomi Indonesia merupakan hasil perpaduan antara ekonomi pasar, ekonomi Islam, dan ekonomi Pancasila, yang bersama-sama membentuk struktur ekonomi campuran berlandaskan nilai keadilan sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana penerapan sistem ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indikator makro seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat: IPM meningkat dari 72,81 menjadi 75,02, tingkat kemiskinan menurun dari 9,78% menjadi 9,03%, dan pengangguran terbuka turun dari 7,07% menjadi 4,91%. Rasio Gini stabil di kisaran 0,38–0,39, menunjukkan ketimpangan masih relatif moderat. Kesimpulannya, sinergi antara ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, dan kebijakan pasar terbuka mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Sistem perekonomian, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam



PENDAHULUAN

Sistem perekonomian merupakan struktur penting dalam kehidupan suatu bangsa, karena menentukan bagaimana sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikelola untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sistem ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif (S. Kholil et al., 2025; K. E. R. Marsudi & Purbasari, 2022). Hal ini menjadikan sistem ekonomi Indonesia berbeda dari negara lain yang cenderung mengadopsi model liberal atau sosialis secara murni.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan struktur ekonomi, mulai dari ekonomi terpusat pada masa Orde Lama hingga liberalisasi pasar pasca reformasi. Namun, perubahan tersebut tidak selalu membawa pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi isu krusial yang menuntut peran negara dalam pengendalian ekonomi (Dallago, 2000a; O. C. Schlecht, n.d.).

Sistem ekonomi Indonesia kini menggabungkan unsur ekonomi pasar, komando, dan tradisional menjadi model campuran. Ekonomi pasar mendorong efisiensi dan inovasi, sementara ekonomi komando memberi ruang bagi negara untuk mengatur distribusi sumber daya. Ekonomi campuran menjadi alternatif yang menggabungkan keduanya (Мисриханова & others, 2022). Unsur tradisional juga masih tampak pada praktik ekonomi desa yang berbasis gotong royong dan adat (B. B. Tokaeva et al., 2023).

Ekonomi Pancasila menjadi identitas nasional dalam mengatur arah kebijakan ekonomi. Ia berakar pada nilai keadilan, gotong royong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (K. E. R. Marsudi & Purbasari, 2022). Selain itu, sistem ekonomi Islam juga memainkan peran penting dalam perekonomian nasional melalui prinsip keadilan distributif, larangan riba, dan penggunaan instrumen sosial seperti zakat, infaq, serta wakaf. Nilai-nilai Islam ini memperkuat konsep ekonomi Pancasila karena keduanya menekankan kesejahteraan bersama dan non-eksploitasi (Assafii & others, 2024a)(Firdaus, 2022).

Perkembangan sistem ekonomi Indonesia tidak lepas dari dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi. Seiring dengan keterbukaan pasar internasional, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Faktor budaya, sosial, dan politik berpengaruh terhadap struktur dan arah kebijakan ekonomi (Abdullaev, 2024; Черничко et al., 2024). Stereotip budaya dalam masyarakat memengaruhi pola konsumsi dan perilaku ekonomi. Selain itu, sejarah kolonialisme dan kebijakan liberalisasi pasca reformasi menciptakan tantangan baru berupa ketimpangan regional dan ketergantungan terhadap investasi asing (Booth, 2016b). Oleh karena itu, adaptasi sistem ekonomi Indonesia terhadap konteks global perlu dilakukan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Pancasila.

Sistem ekonomi yang sehat diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sistem ekonomi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara mekanisme pasar dan kebijakan redistributif (Hussein & others, 2024; Shaikh, 2009)

Dalam konteks Indonesia, tantangan kesejahteraan semakin kompleks akibat dampak pandemi COVID-19, yang menekan sektor tenaga kerja dan menaikkan angka kemiskinan pada



tahun 2021. Namun, kebijakan pemerintah melalui perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional berhasil memperbaiki kondisi kesejahteraan pasca 2022 (BPS), 2024).

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba memahami bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan memengaruhi indikator kesejahteraan seperti IPM, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Fokus utamanya adalah menjelaskan hubungan antara kebijakan ekonomi berbasis Pancasila dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial serta memperkuat arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sistem perekonomian Indonesia merupakan cerminan dari kompleksitas sosial, politik, dan budaya yang membentuknya. Tidak seperti negara lain yang menganut sistem ekonomi tunggal, Indonesia memadukan berbagai filosofi ekonomi, seperti ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Keduanya berorientasi pada pencapaian kesejahteraan bersama dengan memperhatikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata (M. Kholil & others, 2025; S. Marsudi & Purbasari, 2022). Dalam konteks historis, model ini muncul sebagai respons terhadap dominasi kapitalisme global dan ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem liberal.

Konsep sistem ekonomi juga menekankan pada mekanisme pengelolaan sumber daya, hak kepemilikan, serta regulasi pasar yang menentukan distribusi dan konsumsi (Dallago, 2000b). Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi bukan hanya struktur makro, melainkan juga kumpulan institusi yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Ketika mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan, kesenjangan sosial dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam mengatur pasar dan menjamin distribusi yang adil menjadi kebutuhan mutlak dalam menjaga keseimbangan ekonomi (Gregory & Stuart, 2003; O. Schlecht, n.d.).

Secara global, berbagai sistem ekonomi memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap kesejahteraan masyarakat. Ekonomi pasar menekankan kebebasan individu dan efisiensi, namun sering kali menghasilkan ketimpangan. Sebaliknya, ekonomi komando menjamin pemerataan tetapi berisiko terhadap inefisiensi dan kurangnya inovasi (Мисриханова & others, 2022). Ekonomi campuran berupaya menyeimbangkan keduanya, dengan membiarkan pasar berperan dalam inovasi dan pemerintah mengawasi stabilitas serta keadilan sosial (O. Schlecht, n.d.).

Dalam sistem ekonomi tradisional Indonesia, aspek budaya dan adat istiadat berperan besar dalam mengatur kegiatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Tradisi gotong royong dan koperasi menjadi refleksi nyata dari nilai-nilai Pancasila yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat (G. Tokaeva & others, 2023). Walau menghadapi keterbatasan inovasi, sistem tradisional memiliki keunggulan dalam stabilitas sosial dan pemerataan kerja. Integrasi nilai-nilai tradisional dengan mekanisme ekonomi modern merupakan tantangan sekaligus potensi besar bagi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan.

Pada akhirnya, sistem ekonomi Indonesia tidak hanya menjadi alat distribusi kekayaan, tetapi juga instrumen pembangunan karakter bangsa. Penerapan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama mencerminkan komitmen terhadap cita-cita konstitusional sebagaimana



termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 (Kristiani, 2025; Ulum, 2025). Nilai-nilai ekonomi Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara menyeluruh hubungan antara sistem perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sumber data primer diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024, yang meliputi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rasio Gini. Teknik analisis menggunakan deskriptif analitik, yaitu menafsirkan data statistik BPS melalui kajian teoritis tentang sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam (Elliott & Timulak, 2005; Sandelowski, 2000). Validitas data diperkuat melalui triangulasi antara data BPS, literatur ilmiah, dan kebijakan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Indikator Kesejahteraan Indonesia 2020–2024 (Sumber: BPS)

Tahun	IPM	Rasio Gini	Kemiskinan (%)	TPT (%)
2020	72.81	0.38	9.78	7.07
2021	73.16	0.38	10.14	6.49
2022	73.77	0.38	9.54	5.86
2023	74.39	0.39	9.36	5.32
2024	75.02	0.39	9.03	4.91

Periode 2020–2024 menunjukkan tren positif pada indikator kesejahteraan. IPM meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Rasio Gini tetap stabil di kisaran 0,38–0,39, menandakan ketimpangan belum menurun signifikan. Namun, tingkat kemiskinan dan pengangguran berhasil ditekan, menunjukkan efektivitas kebijakan ekonomi pasca-pandemi. ((BPS), 2024).

Peningkatan IPM mengindikasikan hasil nyata dari intervensi negara dalam pendidikan dan perlindungan sosial. Ekonomi Pancasila, yang berlandaskan nilai keadilan sosial, terbukti berperan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (S. Kholil et al., 2025).

Sementara itu, integrasi prinsip ekonomi Islam melalui zakat, infak, dan wakaf turut memperkuat redistribusi pendapatan masyarakat miskin. Ini mempertegas bahwa pendekatan berbasis nilai keagamaan dapat melengkapi kebijakan ekonomi nasional (Assafii & others, 2024b).



Ketimpangan pendapatan yang relatif stabil menunjukkan bahwa sistem ekonomi campuran Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan. Kebijakan fiskal yang progresif dan peningkatan produktivitas sektor UMKM diperlukan untuk memperluas kesempatan ekonomi (Hussein & others, 2024; Shaikh, 2009)

Selain itu, kebijakan investasi pemerintah di sektor infrastruktur dan pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Faktor ini selaras dengan teori pembangunan manusia Amartya Sen, yang menekankan pentingnya perluasan kapabilitas sebagai dasar kesejahteraan sosial.

Analisis data BPS juga menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan terbesar terjadi antara 2021–2024, setelah puncak pandemi. Hal ini menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Prakerja.

Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk ketimpangan antarwilayah. Provinsi dengan aktivitas industri tinggi mengalami peningkatan IPM lebih cepat dibandingkan daerah pedesaan (Agustanta & others, 2023; Booth, 2016a). Maka, pemerataan pembangunan berbasis wilayah menjadi penting untuk mencapai keadilan sosial sesuai nilai Pancasila.

Sistem ekonomi campuran Indonesia memberikan ruang bagi kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat pertumbuhan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi Islam juga berkontribusi melalui lembaga keuangan syariah dan mekanisme redistribusi yang membantu pemerataan pendapatan (Assafii & others, 2024a).

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga ditunjang oleh reformasi kebijakan fiskal yang mendorong produktivitas sektor riil dan peningkatan lapangan kerja (Putri & others, 2025).

Stabilitas rasio Gini di kisaran 0,38–0,39 menandakan masih adanya tantangan dalam pemerataan pendapatan. Ketimpangan ini sebagian besar terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang menekankan pada desentralisasi ekonomi serta pemberdayaan ekonomi lokal (Agustanta & others, 2023).

Hasil penelitian memperkuat argumentasi bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Penerapan prinsip ekonomi Islam dan Pancasila membentuk keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (Zsolnai, 2018).

Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi Indonesia harus terus dikembangkan dalam kerangka keberlanjutan dan kesejahteraan bersama menuju visi Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perekonomian Indonesia yang berbasis pada prinsip Pancasila dan nilai-nilai Islam terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode 2020–2024. Peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, serta perbaikan tingkat pengangguran menunjukkan efektivitas kombinasi antara kebijakan pasar dan intervensi pemerintah. Namun, kestabilan rasio Gini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pemerataan ekonomi. Ke depan, penguatan ekonomi kerakyatan, koperasi, dan sektor produktif berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**REFRENSI**

- Abdullaev, A. (2024). The influence of cultural factors on the management system. *Московский Экономический Журнал*. https://doi.org/10.55186/2413046x_2024_9_4_191
- Agustanta, D., & others. (2023). *Indonesia vs. Singapore: Strategy Contrast*.
- Assafii, A., & others. (2024a). *Zakat–Wakaf dan Inklusi Keuangan*.
- Assafii, A., & others. (2024b). *Zakat–Wakaf dan Inklusi Keuangan di Indonesia*.
- Booth, A. (2016a). *Colonial Legacy and Indonesian Economy*.
- Booth, A. (2016b). *Economic Change in Modern Indonesia: Colonial and Post-colonial Comparisons*. <https://www.cambridge.org/core/books/economic-change-in-modern-indonesia/8463A385B42F1C49D1D28C46EBD8DE1E>
- (BPS), B. P. S. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2020–2024*. <https://www.bps.go.id>
- Dallago, B. (2000a). The Organisational and Productive Impact of the Economic System. The Case of SMEs. *Small Business Economics*, 15(4), 303–319. <https://doi.org/10.1023/A:1011140905499>
- Dallago, B. (2000b). *The Organizational Impact of Economic Systems*.
- Elliott, R., & Timulak, L. (2005). Descriptive–Interpretive Qualitative Methods. In *Handbook of Qualitative Research Methods for Psychology and the Social Sciences*. <https://doi.org/10.1093/med:psych/9780198527565.003.0011>
- Firdaus, A. (2022). Building a Masalah Economic System; Indonesian Economic System. *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-92>
- Gregory, P., & Stuart, R. (2003). *Comparative Economic Systems*.
- Hussein, A., & others. (2024). *Socialism and Welfare Outcomes*.
- Kholil, M., & others. (2025). *Ekonomi Pancasila dan Integrasi Ekonomi Islam*.
- Kholil, S., Nurrohman, N., & Janwari, Y. (2025). Integration of Sharia Economic Philosophy and Pancasila Economics: A Perspective for Indonesia. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1509>
- Kristiani, R. (2025). *Pasal 33 UUD 1945 dan Ekonomi Rakyat*.
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economic and Finance*, 2(1), 27–42. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>
- Marsudi, S., & Purbasari, R. (2022). *Relevansi Ekonomi Pancasila di Era Global*.
- Putri, R., & others. (2025). *Pasar dan Intervensi Negara: Bukti dari Indonesia*.
- Sandelowski, M. (2000). Whatever Happened to Qualitative Description? *Research in Nursing & Health*.
- Schlecht, O. (n.d.). *Market vs. Command Economies*.
- Schlecht, O. C. (n.d.). *Wirtschaftssystem Und Wirtschaftsordnung*. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80894-3_116
- Shaikh, A. (2009). *Capitalism: Competition, Conflict, Crises*.



- Tokaeva, B. B., Simonova, V. A., Krygina, I., & Obukhova, N. I. (2023). Comparative characterization of the main types of economic systems. *Ėkonomika i Upravlenie: Problemy, Rešeniâ*, 11/6(140), 15–22. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2023.11.06.002>
- Tokaeva, G., & others. (2023). *Traditional Economic Systems and Development*.
- Ulum, M. (2025). *Hukum Ekonomi dan Keadilan Sosial di Indonesia*.
- Zsolnai, L. (2018). *Economic Actors and the Ultimate Goal of the Economy* (pp. 151–159). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94529-3_11
- Мисриханова, Z., & others. (2022). *Inefisiensi pada Sistem Ekonomi Komando*.
- Черничко, Т. В., Проскура, В., & Казибрід, О. Р. (2024). Чинники впливу на параметри інноваційного розвитку економічної системи. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.65>